

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP OPINI AUDIT MENGENAI *GOING CONCERN* PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK INDONESIA
PERIODE 2010-2011**

Felicia Lianna Chandra

Akuntansi, FBE, Ubaya
mei-chen_11@hotmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan pengaruh dari penerapan *good corporate governance* terhadap opini audit mengenai *going concern*. Faktor *good corporate governance* yang akan digunakan adalah kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik dan menggunakan sampel sebanyak 132 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode 2010-2011.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial dan komisaris independen memiliki hubungan negatif terhadap pemberian opini audit mengenai *going concern*, sedangkan komite audit memiliki hubungan positif terhadap pemberian opini audit mengenai *going concern*. Namun, ketiga variabel ini memiliki tingkat signifikansi diatas 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investor tidak semata-mata melihat penerapan *good corporate governance* perusahaan untuk mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan yang diminati.

Kata kunci: kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, *going concern*, opini audit

Abstract

This study have a purpose to prove the effect of the application of good corporate governance on the going concern audit opinion. Factors that will be used is managerial ownership, independent commissioners, and audit committee. This study use logistic regression analysis and using a sample 132 companies that listed in the Indonesia Stock Exchange in period 2010-2011.

The result indicate that managerial ownership and independent commissioners have a negative relationship to the provision of the going concern audit opinion, while the audit committee positively related to the provision of the going concern audit opinion. However, all variables have a significance level above 5%. The results of this study indicate that investors do not simply look at the

implementation of good corporate governance in the company to consider the survival of the company.

Keywords: managerial ownership, independent commissioners, audit committee, going concern, audit opinion

PENDAHULUAN

Suatu entitas bisnis dalam menjalankan usahanya tidak hanya menghasilkan keuntungan seoptimal mungkin, namun juga bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup (*going concern*). Menurut Setiawan (2006) dalam Santosa dan Wedari (2007), *going concern* sebagai asumsi bahwa perusahaan dapat mempertahankan hidupnya secara langsung akan mempengaruhi laporan keuangan. Apabila laporan keuangan disusun dengan dasar *going concern* maka dapat diasumsikan perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang. Melalui pelaporan keuangan, auditor akan menilai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, konsisten terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU) di Indonesia, serta menilai apakah ada kesangsian atas kelangsungan hidup perusahaan.

Tugas auditor sebagai perantara antara manajemen dengan pengguna laporan keuangan menyebabkan auditor harus dapat memberikan peringatan awal kepada pengguna laporan keuangan mengenai kelangsungan hidup perusahaan yang diaudit. Namun dalam memberikan opini mengenai *going concern* sering timbul masalah dalam diri auditor, yaitu sulit memprediksi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Hal ini menyebabkan auditor harus berhati-hati dalam memberikan opini mengenai *going concern*, apabila auditor salah memberi opini terkait *going concern*, perusahaan dapat menjadi cepat bangkrut karena banyak investor yang akan membatalkan investasinya ataupun kreditor yang akan menarik kembali dananya (Venuti, 2007).

Opini audit mengenai *going concern* yang diberikan auditor menggambarkan kondisi internal perusahaan yang sedang bermasalah. Menurut Altman dan McGough (1974) dalam Praptitorini dan Januarti (2007), masalah *going concern* terbagi dua: pertama, masalah keuangan yang meliputi defisiensi likuiditas, defisiensi ekuitas,

penunggakan utang, kesulitan memperoleh dana. Kedua, masalah operasi yang meliputi kerugian operasi yang terus menerus, prospek pendapatan yang meragukan, kemampuan operasi terancam dan pengendalian yang lemah atas operasi. Masalah *going concern* ini dapat dicegah dan diatasi dengan adanya suatu aturan untuk mengelola dan mengawasi perusahaan yaitu tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Ini dikarenakan salah satu manfaat GCG adalah menjaga *going concern* perusahaan.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengungkapkan *Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan *stakeholder* lainnya. Dengan menerapkan GCG diharapkan dapat mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan tindakan manipulasi. Sehingga kinerja yang dilaporkan menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya dari perusahaan bersangkutan (Jensen, 1993 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007).

Mekanisme *corporate governance* lain yang tak kalah penting adalah keberadaan komisaris independen dan komite audit. Komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000).

Komite audit bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Komite audit berfungsi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal. Perusahaan yang memiliki komite audit biasanya memiliki manajemen perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga prinsip GCG dapat diterapkan dengan baik (Linoputri, 2010).

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit mengenai *going concern*.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor-faktor GCG yang memiliki pengaruh terhadap opini audit mengenai *going concern* karena adanya perbedaan hasil penelitian (*research gap*) pada penelitian–penelitian sebelumnya. *Research gap* tersebut dapat dilihat dari perbedaan hasil penelitian Januarti (2009) dengan Ballesta dan Garcia-Meca (2005) mengenai kepemilikan manajerial, Ramadhany (2004) dengan Carcello dan Neal (2000) mengenai komisaris independen, dan Linoputri (2010) dengan Pearce dan Zahra (1992) mengenai komite audit. Selain adanya *research gap*, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai faktor yang mempengaruhi opini audit mengenai *going concern*.

LANDASAN TEORI

Opini Audit Mengenai *Going Concern*

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011: SA Seksi 341.06), opini mengenai *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor apabila suatu entitas disangsikan kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam Pernyataan Standar Auditing No. 29.11 huruf c (IAPI, 2011: SA Seksi 508.15) dinyatakan bahwa keadaan tertentu seringkali mengharuskan auditor menambahkan bahasa penjelas dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi *unqualified opinion*, yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan tertentu tersebut termasuk juga jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan auditor yakin tentang adanya kesangsian mengenai kelangsungan hidup perusahaan.

Auditor perlu untuk mempertimbangkan tiga hal, yaitu (1) Kewajiban Auditor untuk memberikan saran bagi kliennya dalam mengungkapkan dampak kondisi ekonomi tersebut (jika ada) terhadap kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, (2) Pengungkapan peristiwa kemudian yang mungkin timbul sebagai akibat kondisi ekonomi tersebut, dan (3) Modifikasi laporan audit bentuk baku jika memburuknya kondisi ekonomi tersebut berdampak terhadap kemampuan

entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bagaimanapun juga, hampir tidak ada panduan yang jelas atau hasil penelitian yang dapat dijadikan acuan pemilihan tipe *going concern report* yang harus dipilih (IPSA nomor 30.01).

Kepemilikan Manajerial dan Opini Audit Mengenai *Going Concern*

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga berhasil menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan pemegang saham. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruance*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faizal, 2004). Dengan meningkatkan persentase kepemilikan, diharapkan manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Manajer tidak hanya mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh laba tetapi juga mengoptimalkan aktivitas investasi. Herawaty (2008) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme *corporate governance* sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam memanipulasi laba. Dengan demikian, kepemilikan manajerial sebagai salah satu mekanisme *corporate governance* merupakan sarana *monitoring* yang efektif yang dapat membawa pada kualitas pelaporan yang lebih tinggi, sehingga opini audit yang diterima atas laporan keuangan perusahaan cenderung merupakan opini yang bersih (*clean opinion*).

H_a = Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial semakin kecil kemungkinan pemberian opini audit mengenai *going concern* perusahaan *go public* periode 2010-2011.

Komisaris Independen dan Opini Audit Mengenai *Going Concern*

Berdasarkan *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI), dewan komisaris merupakan inti *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin

pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Beberapa tugas dewan komisaris untuk mencegah munculnya masalah *going concern* meliputi: memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset, memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan. Namun, di dalam prakteknya dewan komisaris tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga diperlukan dewan komisaris yang benar-benar independen.

Karakteristik dewan komisaris secara umum dan khususnya komposisi dewan dapat menjadi suatu mekanisme yang menentukan tindakan manajemen laba. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan yang dijalankan oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap tercapainya proses penyusunan laporan keuangan berkualitas dan kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

H_b= Semakin banyak jumlah komisaris independen semakin kecil kemungkinan pemberian opini audit mengenai *going concern* perusahaan *go public* periode 2010-2011.

Komite Audit dan Opini Audit Mengenai *Going Concern*

Komite Audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, *New York Stock Exchange* (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan. Sejak itu banyak Negara yang membuat ketentuan mengenai Komite Audit apakah itu dalam bentuk *Code of Best Practices*, peraturan perundang-undangan, maupun persyaratan pencatatan di bursa. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002.

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Komite tersebut ditujukan untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya secara efektif. Berkaitan dengan peran komite audit sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian perusahaan, FCGI membagi tanggung jawab komite audit pada tiga bidang, yaitu: laporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengawasa perusahaan. Komite audit berfungsi untuk meningkatkan fungsi audit internal dan eksternal serta meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya komite audit maka akan ada pengawasan yang lebih kuat agar laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas.

H_c = Keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit mengenai *going concern* perusahaan *go public* periode 2010-2011.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel menggunakan *restricted probability sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sudah terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 2010.
2. Perusahaan tidak *delisting* dari BEI selama periode 2010-2011.
3. Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen yang berakhir 31 Desember untuk periode 2010-2011.
4. Perusahaan mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya satu periode laporan keuangan selama periode penelitian (2010-2011). Hal ini dikarenakan auditor hampir tidak pernah mengeluarkan opini mengenai *going*

concern pada perusahaan yang mempunyai laba bersih setelah pajak positif (McKeown et al, 1991 dalam Senteney, 2006).

5. Perusahaan mengungkapkan informasi mengenai Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen, dan Komite Audit.

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari *website* BEI. Data yang digunakan adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah opini audit. Opini audit diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana bernilai 1 untuk opini audit yang membahas mengenai *going concern* dan bernilai 0 untuk opini audit yang tidak membahas mengenai *going concern*.

Variabel independen, terdiri dari:

- a. Kepemilikan manajerial. Variabel ini diproksikan dengan persentase kepemilikan saham biasa dewan direksi dan dewan komisaris. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana bernilai 1 untuk kepemilikan saham lebih besar sama dengan 5% dan bernilai 0 untuk kepemilikan saham lebih kecil dari 5%.
- b. Komisaris independen. Variabel ini diukur dengan menggunakan proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.
- c. Komite audit. Variabel ini diukur dengan melihat jumlah anggota di dalam komite audit.

Metode Analisis dan Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis multivariate dengan menggunakan regresi logistik, karena variabel bebasnya merupakan kombinasi antara *metric* dan *non metric* (nominal). Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

$$GC = \alpha + \beta_1 \text{MAN_OWN} + \beta_2 \text{IND_COMM} + \beta_3 \text{KOMITE} + \epsilon$$

Dimana:

GC : Opini audit (variabel *dummy*, 1 untuk opini audit mengenai *going concern* dan 0 untuk opini audit mengenai *non going concern*)

α : Konstanta

β_{1-3} : Koefisien regresi

MAN_OWN : Kepemilikan manajerial (variabel *dummy*, 1 untuk kepemilikan saham biasa lebih besar sama dengan 5% dan 0 untuk dibawah 5%)

IND_COMM : Komisaris independen (persentase komisaris independen dalam dewan komisaris)

KOMITE : Komite audit (jumlah anggota komite audit).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Pemilihan sampel menggunakan *restricted probability sampling*, dengan beberapa kriteria. Sampel yang memenuhi semua kriteria dapat dilihat pada tabel 1.

Statistik Deskriptif

Nilai rata-rata serta standar deviasi dari kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit disajikan pada tabel 2 hingga tabel 4.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Kepemilikan manajerial

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit mengenai *going concern*. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit mengenai *going concern* ditolak. Temuan ini konsisten dengan hasil yang terdapat dalam penelitian Januarti (2009) dimana kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap opini mengenai *going concern*. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Linoputri (2010) yang menyatakan kepemilikan direktur dan komisaris dalam perusahaan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini mengenai *going concern*. Penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian dari Ballesta dan Garcia-Meca (2005) yang memberikan hasil bahwa semakin besar kepemilikan manajerial akan memberikan struktur tata kelola perusahaan yang lebih baik yang akan mengurangi kemungkinan pemberian opini audit mengenai *going concern*. Penelitian ini juga memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi ketidak selarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham.

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa besar atau kecilnya proporsi kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap opini yang akan diberikan auditor. Hal ini disebabkan karena dewan komisaris dan direksi, baik yang memiliki saham di perusahaan maupun tidak memiliki sama-sama bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki, yaitu untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. *Security dealing rules* menegaskan bahwa direksi perseroan memiliki saham perseroan hanya dalam rangka investasi jangka panjang. Jumlah yang dimiliki hanya sebatas yang diizinkan peraturan tersebut. Sesuai dengan azas keterbukaan dan aturan tersebut, seluruh anggota direksi dan dewan komisaris perusahaan melaporkan posisi kepemilikan sahamnya secara periodik setiap triwulan.

Komisaris independen

Variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit mengenai *going concern*. Sehingga hipotesis yang menyatakan jumlah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit mengenai *going concern* ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil yang terdapat dalam penelitian Ramadhany (2004) yang memberikan hasil bahwa kurang efektifnya keberadaan komisaris independen dalam membantu keputusan auditor mengeluarkan opini mengenai *going concern*. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ballesta dan Garcia-Meca (2005) dan Linoputri (2010) yang tidak berhasil menjelaskan keberadaan komisaris independen pada komite audit dalam membantu auditor mengeluarkan keputusan opini mengenai *going concern*. Carcello dan Neal (2000) dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu keberadaan komisaris independen yang lebih banyak dalam komite audit mengurangi kemungkinan bagi auditor untuk mengeluarkan opini mengenai *going concern*.

Dari penelitian ini didapat hasil bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit mengenai *going concern*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun (Boediono, 2005). Siregar dan Utama (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan GCG di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegaskan dari hasil survei Asian Development Bank dalam Boediono (2005) yang menyatakan bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab anggota dewan menjadi tidak efektif.

Hasil penelitian ini menggambarkan banyaknya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pemberian opini mengenai *going concern* oleh auditor. Bapepam mensyaratkan adanya 30% dewan komisaris independen, namun tidak membedakan tugas dan tanggung jawab komisaris independen dari dewan komisaris lainnya. Hal ini menyebabkan adanya komisaris independen tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan. Selain itu, Bapepam tidak membuat peraturan terkait evaluasi kinerja komisaris independen sehingga pihak eksternal tidak dapat mengetahui apakah komisaris independen telah bekerja sesuai dengan peraturan dari Bapepam. Selama ini pihak eksternal menggunakan frekuensi rapat dewan komisaris sebagai tolak ukur dari kinerja dewan komisaris. Namun frekuensi rapat yang dilakukan dewan komisaris selama satu periode tidak dapat menggambarkan kinerja dari dewan komisaris yang sesungguhnya.

Komite audit

Variabel komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemberian opini audit mengenai *going concern*. Hal ini menyebabkan hipotesis yang menyatakan keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan pemberian opini audit mengenai *going concern* ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ramadhany (2004) dan Linoputri (2010) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini mengenai *going concern* oleh auditor. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan pendapat Pearce dan Zahra (1992) yang menyatakan efektivitas komite audit akan meningkat bila ukuran komite meningkat karena memiliki sumber daya lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

Dari pengujian terhadap hipotesis tersebut diperoleh hasil bahwa keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap pemberian opini audit mengenai *going concern*. Dari hasil ini dapat dikatakan bahwa ukuran komite audit kurang mampu menunjang efektivitas kinerja dari komite audit tersebut, posisi komite audit masih sebatas untuk mematuhi peraturan dan persyaratan pencatatan

perusahaan di bursa. Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sinyal bagi komite audit agar dapat membantu dewan komisaris dengan lebih efektif, misalnya dalam hal memastikan struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik. Sebab meskipun hampir semua perusahaan telah memiliki komite audit, masih banyak perusahaan yang menerima opini audit mengenai *going concern*. Hasil penelitian mengenai komite audit dan komisaris independen menunjukkan kurangnya peran komite audit dan komisaris independen dalam menegakkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, didukung laporan mengenai GCG oleh CLSA Asia Pacific Markets tahun 2004 dalam Kaihatu (2006) yang menempatkan Indonesia di urutan terbawah.

Komite audit sebagai bagian dari mekanisme *corporate governance* seharusnya dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih baik dalam hal tata kelola perusahaan seperti yang diatur oleh FCGI sebagai pedoman untuk komite audit, yaitu memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memberikan implikasi terhadap berbagai pihak yang berkepentingan terhadap keputusan auditor dalam memberikan opininya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak investor tidak hanya melihat penerapan GCG perusahaan dalam mengambil keputusan investasinya. Investor juga tidak semata-mata menggunakan opini auditor untuk menilai suatu perusahaan karena isi dari opini auditor terkesan baku sehingga kurang dapat menggambarkan kondisi perusahaan secara nyata.

Penerapan dari GCG yang seharusnya dapat membantu perusahaan dalam menjaga kelangsungan hidupnya masi belum dapat dirasakan. Hal ini dapat

diakibatkan oleh pihak manajemen yang kurang serius dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dari GCG.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari data yang telah diolah dapat disimpulkan bahwa (1) besarnya proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit mengenai *going concern*. Penolakan hipotesis ini menggambarkan bahwa besar atau kecilnya saham yang dimiliki pihak manajemen tidak mempengaruhi auditor dalam memberikan opini. (2) banyaknya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit mengenai *going concern*. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen tidak untuk menegakkan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan. (3) keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap kemungkinan pemberian opini audit mengenai *going concern*. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit kurang mampu menunjang efektivitas kinerja dari komite audit tersebut.

Sedangkan saran bagi penelitian selanjutnya adalah (1) memperpanjang periode penelitian agar dapat diperoleh efek jangka panjang penerapan GCG terhadap pemberian opini audit mengenai *going concern*. (2) menggunakan variabel independen lainnya agar dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pemberian opini audit mengenai *going concern*. (3) menambah sumber data dan menggali data lebih dalam ke obyek agar dapat mengetahui lebih pasti variabel yang digunakan memberikan hasil yang akurat. (4) penelitian berikutnya dapat memperdalam penelitian mengenai komite audit dengan melihat komite audit dari independensi serta keahlian yang dimiliki anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ballesta, Juan P. S. and E. Garcia-Meca, 2005. ***Audit Qualifications and Corporate Governance in Spanish Listed Firms***. *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20, No. 7, pp. 725-738.
- Carcello, J.V. and T.L. Neal, 2000. ***Audit Comitte Composition and Auditor Reporting***. *The Acoounting Review*, Vol.75, No.4:453-467.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2000. **Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Corporate Governance**.
- Januarti, Indira, 2009. **Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor, Kepemilikan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern**. Jurnal SNA XII Palembang.
- Linoputri, F. P., 2010. **Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern**. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Pearce, J.A. and Zahra, S.A., 1992. ***Board composition from a strategic contingency perspective***. *Journal of Management Studies*, Vol.29, 4: 411-438.
- Praptitorini, M. D. dan I. Januarti, 2007. **Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default, dan Opinion Shopping terhadap Penerimaan Opini Going Concern**. Jurnal SNA X.
- Ramadhany, Alexander, 2004. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Mengalami Financial Distress di Bursa Efek Jakarta**. Jurnal Maksi, Vol. 4.
- Santosa, Arga F. dan Linda K. Wedari, 2007. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern**. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol.11 No.2:141-158.
- Senteney, David L., 2006. ***Predicting Impending Bankruptcy From Auditor Qualified Opinions and Audit Firm Changes***. *Journal of Applied Business Research*, Vol. 22, No.1.
- Ujiyantho, M. A. dan B. A. Pramuka, 2007. **Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan**. Jurnal SNA X.

LAMPIRAN

Tabel 1

Proses Seleksi Populasi Berdasarkan Kriteria

No.	Kriteria	Pelanggaran Kriteria
	Jumlah perusahaan pada populasi penelitian	459
1.	Perusahaan sudah terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 2010	(61)
2.	Perusahaan tidak <i>delisting</i> dari BEI selama periode 2010-2011	(7)
3.	Menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen yang berakhir 31 Desember selama periode penelitian	(28)
4.	Mengalami laba bersih setelah pajak yang negatif sekurangnya 1 periode selama periode penelitian	(289)
5.	Mengungkapkan informasi mengenai kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan komite audit	(8)
	TOTAL	66

Tabel 2

Analisis Statistik Deskriptif Sampel *Going Concern*

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Manajerial	52	0	1	.0268038	.112
Komisaris Independen	52	.00000000	1.00000000	.4185897504	.15661360448
Komite Audit	52	2	4	3.00	.280
Valid N (listwise)	52				

Tabel 3

Analisis Statistik Deskriptif Sampel *Non-Going Concern*

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Manajerial	80	0	1	.0339913	.113
Komisaris Independen	80	.25000000	1.00000000	.4490625058	.14536917758
Komite Audit	80	0	4	2.97	.693
Valid N (listwise)	80				

Tabel 4
Analisis Statistik Deskriptif Seluruh Sampel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Manajerial	132	0	1	.03	.112
Komisaris Independen	132	.00000000	1.00000000	.4370580870	.15005411541
Komite Audit	132	0	4	2.98	.566
Valid N (listwise)	132				

Tabel 5

Iteration History ^{a,b,c,d}						
Iteration		-2 Log likelihood	Coefficients			
			Constant	Persentase Kepemilikan Manajerial	Proporsi Komisaris Independen	Jumlah Komite Audit
Step 1	1	171.174	.088	-1.133	-1.820	.137
	2	171.025	.136	-1.360	-2.008	.145
	3	171.024	.137	-1.375	-2.012	.145
	4	171.024	.137	-1.375	-2.012	.145

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 177,006

d. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Tabel 6

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	6.713	6	.348

Tabel 7

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	5.982	3	.112
	Block	5.982	3	.112
	Model	5.982	3	.112

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	171.024 ^a	.044	.060

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than ,001.

Tabel 8

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	PersentaseKepemilikanManajerial	-1.375	.717	3.678	1	.055	.253
	ProporsiKomisarisIndependen	-2.012	1.324	2.309	1	.129	.134
	JumlahKomiteAudit	.145	.320	.207	1	.650	1.157
	Constant	.137	1.070	.016	1	.898	1.147

a. Variable(s) entered on step 1: PersentaseKepemilikanManajerial, ProporsiKomisarisIndependen, JumlahKomiteAudit.